

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fenomena gerakan penolakan terhadap PIP di Desa Belo Laut merupakan gejala sosial yang sangat menarik untuk di kaji. Permasalahan gerakan ini pada dasarnya hanya terjadi di Desa Belo Laut sampai saat ini. Pada awalnya gerakan ini bermula pada keresahan yang terjadi di masyarakat setempat akibat adanya aktivitas penambangan. Penambangan yang dilakukan menggunakan alat yang bernama PIP. Hadirnya PIP sendiri menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat setempat. Beroperasinya PIP di perairan pantai setempat telah diizinkan oleh pihak pemerintah setempat. Perizinan juga hanya di putuskan oleh sebelah pihak saja sehingga memicu terjadinya perselisihan antar kedua pihak. Pihak yang tidak setuju dengan masuknya PIP ialah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Aktivitas penambangan yang beroperasi membuat kerusakan laut di daerah setempat. Kerusakan laut berdampak pada ekonomi masyarakat yaitu para nelayan kesulitan untuk melakukan kegiatan melautnya. Perolehan hasil tangkapan yang buruk dikarenakan kondisi stuktur tanah yang tidak lagi rata di akibatkan oleh aktivitas penambangan. Hal ini tentu akan merugikan para nelayan. Namun terdapat pula masyarakat yang setuju akan PIP terutama masyarakat yang bukan bekerja sebagai nelayan. Perbandingan antara pihak pro dan kontra

sangatlah jauh. Pihak kontra terhadap PIP sangatlah dominan sehingga masyarakat yang tidak setuju sangat mudah untuk melakukan bentuk protes.

Pola gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belo Laut sangatlah bervariasi. Dimulai dari aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang menuntut agar PIP tidak lagi beroperasi. Selain itu, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ditujukan pula pada para pekerja PIP. Contohnya ialah pembuangan bekal makanan para pekerja yang dilakukan oleh masyarakat dan penarikan alat tambang. Pembuangan bekal makanan merupakan bentuk gerakan anti tambang yang dilakukan oleh para nelayan.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya gerakan penolakan terhadap PIP ialah pertama, terancamnya kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat berfikir akan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan PIP. Dengan terus beroperasinya penambangan timah maka akan membuat terjadinya kerusakan laut. Terlihat dari kondisi air yang tidak lagi jernih berimplikasi pada ekosistem lautnya. Selain itu pula limbah yang dihasilkan oleh PIP sangat berbahaya. Oleh karenanya masyarakat tidak setuju dengan adanya PIP di Desa Belo Laut. Kedua, kekhawatiran angka kriminalitas akan meningkat. Masyarakat Desa Belo Laut berfikir bahwa masuknya PIP juga berdampak pada kriminalitas yang akan terjadi di wilayah mereka dikarenakan melihat dari daerah lain yang telah beroperasi PIP. Hal ini pula yang masyarakat tidak menginginkan hal yang sama terjadi di wilayah mereka. Ketiga, keterbukaan terhadap masukan dari luar. Masyarakat setempat mempunyai sifat keramah tamahan yang baik dan mudah menerima masukan dari masyarakat luar terkait dengan gerakan penolakan

PIP. Dengan adanya masukan dari luar maka masyarakat akan melakukan gerakan penolakan PIP.

Dengan berbagai tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat menuai hasil yang positif. Hasil yang diperoleh terjadi pada saat Bupati Bangka Barat telah mendatangkan surat perjanjian kesepakatan bersama yang di buat oleh para nelayan. Inti dari kesepakatan tersebut ialah masyarakat menuntut agar PIP tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di desa setempat. Dengan di tandatangan perjanjian tersebut maka PIP tidak lagi mempunyai izin operasi. Saat ini aktivitas penambangan di Desa Belo Laut tidak ada lagi dan para nelayan pun saat ini sudah dapat bekerja melaut dengan nyaman.

## **B. Implikasi Teori**

Penelitian ini menggunakan teori Anthony Obershall yang memberi penjelasan mengenai mobilisasi sumber daya untuk menganalisis permasalahan gerakan penolakan PIP. Menurut Anthony Obershall mobilisasi sumber daya ialah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan gerakan penolakan PIP ialah memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Potensi-potensi yang ada baik itu dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Artinya bahwa relasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia mempunyai keterkaitan dari segi kehidupan sosialnya. Kerusakan sumber daya alam yang rusak menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sehingga

menimbulkan gerakan sosial. Gerakan penolakan berbentuk aksi protes masyarakat yang menolak keberadaan PIP.

Hubungan teori mobilisasi sumber daya dengan penelitian ini ialah dilihat dari masyarakat Desa Belo Laut yang dalam menjalankan kehidupan sosialnya dengan mata pencaharian mayoritas bekerja sebagai nelayan. Bagi para nelayan ekosistem laut sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Penting bagi mereka untuk menjaga kondisi lautnya agar tidak tercemar di karenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan hanya dapat memanfaatkan hasil lautnya dengan menjala ikan. Hadirnya PIP di perairan pantai setempat membuat para nelayan sulit untuk memperoleh hasil tangkapan yang berimplikasi pada kehidupan sehari-hari. Kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas penambangan merupakan salah satu terjadinya gerakan penolakan PIP. Dengan adanya mobilisasi sumber daya yang merupakan dasar terjadinya gerakan sosial. Terjadinya gerakan sosial sendiri bermula pada adanya tujuan bersama yaitu untuk menghilangkan aktivitas penambangan yang ada di desa setempat. Selain itu pula terbentuk suatu komunitas nelayan lokal yang bertujuan untuk menyusun strategi atau cara-cara yang akan dilakukan pada saat terjadinya gerakan sosial. Artinya bahwa gerakan penolakan yang terjadi berbentuk unjuk rasa untuk menuntut agar PIP tidak lagi beroperasi di perairan pantai setempat. Oleh karena hadirnya PIP yang berdampak buruk bagi para nelayan menimbulkan suatu gerakan penolakan anti tambang. Masyarakat yang menolak dengan hadirnya PIP berpendapat bahwa terancam kehilangan mata

pencapaian sebagai nelayan sangatlah memungkinkan dikarenakan ekosistem lautnya yang telah rusak.

Dari pemaparan ini peneliti berasumsi bahwa mobilisasi sumber daya ialah dasar terjadinya gerakan sosial. Gerakan penolakan PIP sendiri terjadi di Desa Belo Laut. Berlandaskan pada pemanfaatan potensi yang tersedia dalam hal sumber daya manusianya untuk mengsucceskan suatu gerakan sosial. Potensi yang ada ialah masyarakat setempat memiliki kesamaan dalam hal mata pencarian. Masyarakat yang homogen membuat suatu solidaritas antar masyarakat sangat tinggi. Dengan adanya rasa kekompakan yang dimiliki oleh para nelayan akan menunjang keberhasilan gerakan sosial. Hal inilah yang membuat masyarakat sukses dalam hal melakukan gerakan penolakan PIP.

### C. Saran

Gerakan penolakan PIP masyarakat Desa Belo Laut adalah sebuah fenomena sosial yang berkaitan dengan aksi penuntutan hak oleh para nelayan. Hal ini berkaitan dengan keresahan yang di rasakan oleh para nelayan dalam hal kondisi lautnya yang rusak di akibatkan aktivitas penambangan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka terdapat saran yang diberikan peneliti untuk menyikapi permasalahan gerakan penolakan PIP diantaranya sebagai berikut :

1. Interaksi sosial antar sesama masyarakat Desa Belo Laut terlihat berjalan dengan baik. Selain itu pula hubungan antar beberapa dusun tergolong sangat solid. Untuk itu masyarakat harus bisa mempertahankan dan mempererat tali silaturahmi agar tetap harmonis seperti halnya saling bahu-

membahu, saling menghargai antar dusun. Namun ada baiknya pula, masyarakat dapat menjalin hubungan dengan masyarakat luar agar dapat dengan mudah memperoleh informasi terutama bagi para nelayan. Tujuannya ialah dengan adanya relasi yang terjalin dengan masyarakat luar maka akan mempermudah pula distribusi hasil tangkapan ke daerah lainnya.

2. Teknologi yang masih belum berkembang di Desa Belo Laut membuat masyarakat mengalami keteringgalan dibidang teknologi. Perlunya teknologi yang ada di masyarakat akan mempermudah dalam sisi kemajuan desa. Namun teknologi harus dimanfaatkan dengan baik sehingga akan membawa dampak positif bagi masyarakat.
3. Pemerintah, khususnya pada pemerintahan desa maupun pemerintahan Kabupaten Bangka Barat harus memberikan perhatiannya ke pada Desa Belo Laut guna untuk memajukan desa. Dalam hal ini juga berkaitan dengan status pemberian segala surat perizinan agar tidak dimanfaatkan atau menguntungkan satu pihak saja. Selain itu pula, pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan sehingga masyarakat akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial